

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Zakariya. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jilid 3.
- Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Abu Ishaq Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Fajar Ali dkk. "Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 2, no. 1 (2026).
- Amnesty International Indonesia. "Pasal Karet UU ITE Ancam Kebebasan Berekspresi." 2020.
- Andreas Antonio dan Ade Adhari. "Menilai Implementasi Undang-Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik." *Ranah Research Journal* 6, no. 4 (2024).
- Artani Hasbi. *Musyawah dan Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- CNN Indonesia. "Jerinx Divonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara Kasus IDI Kacung WHO." 2020.

- DetikNews. "*Jerinx SID Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian dan Cemarkan Nama Baik IDI.*" 2020.
- Ecce Febriyana. *Analisis Siyâsah Dustûriyyah terhadap Kebebasan Berekspresi.* Skripsi. IAIN Ponorogo, 2025.
- Farizki, Muhammad Zidan. *Analisis Normatif Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial.* Skripsi, 2025.
- Fadhilatul Husni. "*Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah.*" *Ijtihad* 36, no. 1 (2020).
- Gagah Andika. *Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.*
- Gihifary Rexianda Davisto. "*Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.*" *Sosio Yustisia* 5, no. 2 (2025).
- Gramedia Literasi. "*Hak Asasi Manusia (HAM).*"
- Hadi Mulyono, Ali Uraidi, dan Tedjo Asmo Sugeng. "*Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum Islam.*" 2025.
- Hasib, M. O. "*HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.*" *Jurnal Al-Wasath* (2021).
- Hufron, Syofyan Hadi, dan Baharuddin Riqiey. "*Konstitusionalisme Digital dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital.*" *KNAPHTN* 3, no. 1 (2025).

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Inas, Ikram Raja. *Kemerosotan Demokrasi di Indonesia: Studi atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Media Sosial Twitter*. Skripsi, 2025.
- Janualdi Renata. "Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIT, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

KBBI. "*Kebebasan*."

KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. "*Kontribusi Negara Hukum dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia di Indonesia*."

Kwikki Angie. "*Pengertian Landasan Teori dan Pentingnya dalam Penelitian*."

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "*Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat*."

Lunatech Indonesia. "*Ruang Digital: Masa Depan Interaksi dan Komunikasi*."

Lutfi Yusup Ramathoni, Sudiyono, dan Ahmad Rizqi. "*Dinamika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*." *Cangkal* 1, no. 1 (2025).

M. Apandi dkk. "*Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspresi di Era Digital*." *Rewang Rencang* 5, no. 12 (2024).

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Effendi. "*Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi Cyberspace*." *Jurnal Juridica* 1, no. 1 (2019).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal. "*Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE*" *Pranata Hukum* 3, no. 1 (2021).

Nurul Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*.

R. Hcrlambang Perdana Wiratraman dkk. *Studi dan Advokasi Masyarakat. ELSAM*, 2016.

Rahmazani. "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 (2022).

Sapardiyono dkk. "Peningkatan Literasi Hukum Digital bagi Remaja Panti Asuhan Muhammadiyah Wates." *Bagelen Community Service* 3, no. 2 (2025).

Scribd. "2 Jenis Ruang Publik Virtual."

Scribd. *Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Selvi Amelia. "Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat." *STAATSRECHT* 4, no. 2 (2024).

Setiawan, M. N. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3)." *DATIN LAW JURNAL*. 2, no. 1 (2021).

- Setiawan dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.
- Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian. "Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat." DIKTUM 20, no. 1 (2022).
- Syafriani, Endika. *Implementasi Kebebasan Berekspresi pada Media Sosial Berdasarkan Konsep Negara Hukum*. Skripsi, 2022.
- Syurpana Nofanda. "Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik." *Justitiabile* 7, no. 2 (2025).
- Trisnowaty Tuahunsc. *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat*. 2017.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 34: Article 19 – Freedoms of Opinion and Expression, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wikipedia. "Kebebasan."
- Yusrizal. *Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi, 2025.
- Zulfikri. *Batasan Kebebasan Berekspresi dalam Media Sosial Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Islam*. Skripsi, 2023.